INSTITUT AGAMA ISLAM IMAM GHOZALI (IAIG) CILACAP
LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)

Al-Munqidz : Jurnal Kajian Keislaman

Jl. Kemerdekaan Barat No.17 Kesugihan-Cilacap || <https://ejournal.iaig.ac.id/index.php/amk>
Issn SK no. : 0005.235/Jl.3.2/SK.ISSN/2012.07 || 0005.27158462/Jl.3.1/SK.ISSN/2020.01

MANAJEMEN KELEMBAGAAN PENDIDIKAN ISLAM

Ismah

Dosen Prodi KPI

Institut Agama Islam Imam Ghazali Cilacap

Email: Ismahcilacap@gmail.com

Naskah Diterima
18 Agustus 2020

Publis Artikel
7 September 2020

Abstrak: Lembaga pendidikan Islam (LPI) telah banyak berkontribusi dalam pengembangan pendidikan di Indonesia, baik pendidikan formal maupun non formal, Pendidikan Islam merupakan sub sistem dari sistem pendidikan nasional., maka masing- masing lembaga pendidikan Islam yang ada berfungsi untuk mencapai tujuan lembaga yang ditetapkan. Keberadaan Lembaga Islam baik pesantren, madrasah atau sekolah-sekolah agama dan perguruan tinggi agama Islam memiliki peranan yang besar bagi pencapaian tujuan pendidikan nasional. akan tetapi seringkali LPI mengalami kendala dalam melakukan pengembangan karena seringkali model penegelolaannya memakai pola konvensional . Untuk itu LPI sudah harus menerapkan sistem manajemen pengelolaan yang dapat mengikuti perkembangan zamannya agar tidak ditinggalkan masyarakat.

Kata kunci: *Lembaga Pendidikan Islam, manajemen*

A. Pendahuluan

Manajemen adalah bagian terpenting dari syarat lembaga menjalankan fungsinya, maka pendidikan Islam dalam konteks kelembagaan harus mempunyai sistem manajemen tertentu dalam mencapai tujuannya. Manajemen Pendidikan Islam telah memenuhi persyaratan sebagai bidang ilmu pengetahuan, karena telah dipelajari dalam kurun waktu yang lama dan memiliki serangkaian teori yang perlu diuji dan dikembangkan dalam praktek manajerial pada lingkup organisasi.¹

¹ Sulistiyorini. *Manajemen Pendidikan Islam*. Surabaya : elKAF, 2006, hlm. 5

Sebagai ilmu pengetahuan, manajemen juga bersifat universal, dan mempergunakan kerangka ilmu pengetahuan yang sistematis mencakup kaidah-kaidah, prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang cenderung benar dalam semua situasi manajerial. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan manajemen dapat diterapkan dalam setiap organisasi baik pemerintah, pendidikan, perusahaan, keagamaan, sosial dan sebagainya. Manajemen dibutuhkan oleh setiap organisasi, jika seorang manajer mempunyai pengetahuan tentang manajemen dan mengetahui bagaimana menerapkannya, maka dia akan dapat melaksanakan fungsi-fungsi manajerial secara efektif dan efisien.²

Lembaga Pendidikan adalah merupakan suatu wadah lembaga yang menghantarkan seseorang kedalam alur berfikir yang teratur dan sistematis. Dalam pengertiannya Pendidikan adalah “usaha sadar dan direncanakan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara”. Dalam pelaksanaannya sebuah lembaga pendidikan kerap-kali dihadapkan pada problem-problem sistem pembelajaran, mulai dari penyiapan sarana dan prasarana, materi, tujuan bahkan sampai pada penyiapan proses.

Dalam perkembangannya lembaga pendidikan sebagai sebuah lembaga yang bergerak dibidang non-profit oriented, memaksa pelaksana pendidikan menggunakan teori-teori yang sebelumnya sudah berkembang dalam dunia ekonomi. Maka tak heran ketika kita mendengar adanya teori manajemen pendidikan, yang pada dasarnya itu diambil dari teori-teori manajemen dalam dunia bisnis. Bukan berarti setelah meminjam teori manajemen ekonomi sebuah lembaga pendidikan menjadi komersial, tetapi semata-mata hanyalah digunakan sebagai landasan yang sistematis untuk mengelola sebuah lembaga pendidikan. Sehingga hasilnya pun tidak bisa seperti yang diharapkan kalau seseorang menerapkan teori manajemen dalam bidang bisnis.

Pengelolaan pendidikan Islam sampai saat ini masih menjadi persoalan yang mendasar dan perlu penanganan yang serius, sebagaimana yang disampaikan menteri agama Suryadarma bahwa Indonesia memiliki 614 pendidikan formal Islam. Namun, pendidikan formal Islam ini masih memiliki beberapa kelemahan. Antara lain, belum terintegrasinya sistem pendidikan dari strata 1 hingga strata 3. Pendidikan formal Islam juga masih kurang memiliki manajemen

²<http://nartosabdo.blogspot.co.id/manajemen-lembaga-pendidikan-islam.html>. di akses 5 Oktober 2015.

juga masih memiliki sisi pembiayaan yang minimal. Secara teknis masalah yang selalu dihadapi lembaga pendidikan Islam adalah soal isu relevansinya dengan sistem pendidikan sekolah, standar pendidikan yang belum sama, serta mutu tenaga pendidik yang masih kurang.³

Walaupun pernyataan tersebut hanya menyebut perguruan tinggi saja akan tetapi cukup mewakili gambaran lembaga pendidikan Islam secara luas. Pendidikan sebagai salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia, pada intinya bertujuan untuk memanusiakan manusia, mendewasakan, serta merubah perilaku, serta meningkatkan kualitas menjadi lebih baik. Pada kenyataannya pendidikan bukanlah suatu upaya yang sederhana, melainkan suatu kegiatan yang dinamis dan penuh tantangan. Pendidikan akan selalu berubah seiring dengan perubahan zaman, setiap saat pendidikan selalu menjadi fokus perhatian dan bahkan tak jarang menjadi sasaran ketidakpuasan karena pendidikan menyangkut kepentingan semua orang, bukan hanya menyangkut investas dan kondisi kehidupan di masa yang akan datang, melainkan juga menyangkut kondisi dan suasana kehidupan saat ini.

lembaga pendidikan merupakan tempat proses pendidikan dilakukan, memiliki sistem yang kompleks dan dinamis. Dalam kegiatannya adalah tempat yang bukan hanya sekedar tempat berkumpul guru dan murid, melainkan berada dalam satu tatanan sistem yang rumit dan saling berkaitan, oleh karena itu lembaga pendidikan dipandang sebagai suatu organisasi yang membutuhkan manajemen/pengelolaan. Lebih dari itu, kegiatan organisasi lembaga pendidikan adalah mengelola sumber daya manusia yang diharapkan menghasilkan lulusan berkualitas, sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, serta pada gilirannya lulusan lembaga pendidikan diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pembangunan bangsa.

Secara eksternal, lembaga pendidikan berhubungan dengan instansi lain baik secara vertikal maupun horizontal. Di dalam konteks pendidikan, lembaga pendidikan memiliki stakeholders (yang berkepentingan), oleh karena itulah lembaga pendidikan memerlukan pengelolaan/manajemen yang akurat agar dapat memberikan hasil optimal sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan semua pihak. Secara eksternal, sekolah berhubungan dengan instansi lain baik secara vertikal maupun horizontal.

B. Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam

1. Lembaga Pendidikan Islam

³ [Http://Khazanah.Republika.Berita Dunia Islam](http://Khazanah.Republika.Berita Dunia Islam) di akses . 16 oktober 2015

Secara bahasa lembaga adalah suatu organisasi dan pendidikan adalah usaha manusia dewasa dalam mengembangkan potensi anak yang sedang berkembang untuk menjadi manusia yang berguna. Segala kegiatan yang diarahkan dalam rangka mengembangkan potensi anak menuju kesempurnaannya secara terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan adalah menjadi hakikat pendidikan. Untuk mencapai sasaran dan fungsi di maksud maka sistem persekolahan atau lembaga pendidikan menjadi salah satu wahana strategis dalam membina sumber daya manusia berkualitas.

Pendidikan Islam merupakan sub sistem dari sistem pendidikan nasional. Karena itu sebagian sub sistem, maka masing-masing lembaga pendidikan Islam yang ada berfungsi untuk mencapai tujuan lembaga yang ditetapkan. Keberadaan lembaga-lembaga pendidikan Islam baik pesantren, madrasah atau sekolah-sekolah agama dan perguruan tinggi agama Islam memiliki peranan yang besar bagi pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Peran yang dijalankan dalam rangka mencapai fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Sebagaimana dinyatakan bahwa: “pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”

Kebijakan MBS (Manajemen Berbasis sekolah) di Indonesia baru dimulai sejak tahun 1999/2000, yaitu dengan peluncuran dana bantuan yang disebut dengan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM). Dana bantuan ini disetor langsung ke rekening sekolah, tidak melalui alur brokrasi pendidikan di atasnya.

Sedangkan pada lembaga pendidikan Islam, pesantren merupakan salah satu model dari pendidikan berbasis masyarakat. Kebanyakan pesantren berdiri atas inisiatif masyarakat muslim yang tujuan utamanya adalah untuk mendidik generasi muda agar memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan baik. Pesantren dengan cara hidupnya yang bersifat kolektif barangkali merupakan cerminan dari semangat dari tradisi dan lembaga gotong royong yang umum terdapat di pedesaan. Pesantren kemudian berhasil mempertegak eksistensinya sebagai pusat belajar masyarakat

Pesantren yang merupakan “Bapak” dari pendidikan Islam di Indonesia, didirikan karena ada tuntutan dan kebutuhan zaman, hal ini bisa dilihat dari perjalanan sejarah, dimana bila diruntut kembali, sesungguhnya pesantren dilahirkan atas kesadaran kewajiban dakwah Islamiyah, yakni menyebarkan dan mengembangkan ajaran Islam, sekaligus mencetak kader-kader ulama/da’i.

Pembangunan suatu pesantren didorong oleh kebutuhan masyarakat akan adanya lembaga pendidikan. Namun demikian, faktor guru yang memenuhi persyaratan keilmuan yang diperlukan akan sangat menentukan bagi tumbuhnya suatu pesantren. Pada umumnya berdirinya suatu pesantren diawali dari pengakuan masyarakat akan keunggulan dan ketnggan lmu seorang guru atau kiai. Karena keinginan menuntut dan memperoleh ilmu dari guru tersebut, maka masyarakat sekitar, bahkan dari luar daerah datang kepadanya untuk belajar. Mereka lalu membangun tempat tinggal yang sederhana di sekitar tempat tinggal guru tersebut. Semakin tinggi ilmu seorang guru, semakin banyak orang dari luar daerah yang datang untuk menuntut ilmu kepadanya dan berarti semakin besar pula pondok dan pesantrennya.

2. Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam masa kerajaan

Masa kerajaan Islam merupakan salah satu dari perodesasi perjalanan sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, sebab sebagaimana lahirnya kerajaan Islam yang disertai dengan berbagai kebijakan dari penguasanya saat itu, sangat mewarnai Sejarah Islam di Indonesia, terlebih agama Islam juga pernah dijadikan sebagai agama resmi negara/kerajaan pada saat itu. Karena itulah, bila kita berbicara tentang perjalanan sejarah pendidikan Islam di Indonesia, tentu saja kita tidak bisa mengenyampingkan bagaimana keadaan Islam itu sendiri pada masa kerajaan Islam. Berikut ini akan dikemukakan beberapa kerajaan Islam di Indonesia, serta bagaimana perannya dalam pendidikan Islam dan dakwah Islamiyah tentunya. Kemudian pada masa penjajahan pendidikan Islam mendapatkan perhatian khusus dari kolonial Belanda dan Jepang. Mereka berusaha untuk melumpuhkan Islam pada saat itu dengan membuat kebijakan yang membatasi proses berlangsungnya pendidikan Islam di Indonesia. Dan yang terakhir pada masa kemerdekaan.⁴

⁴ Musyirifah Sunanto. *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*. Jakarta: PT Grafindo Persada, Cetakan keempat, 2012, hlm. 104

Pendidikan agama islam di kerajaan Samudera Pasai semakin berkembang pesat. Pamudera Pasai terus berfungsi sebagai pusat studi Islam di Asia Tenggara. Selain di Samudera Pasai, Kerajaan Malaka dan Kerajaan Aceh juga menjadi salah satu pusat studi Islam pada saat itu.

Sistem pengajaran bagi setiap muslim sama seperti negara-negara muslim yang lain, yaitu dengan pengajian Al-qur'an dengan mempelajari tajwid, juz 'amma untuk tahap pemula. Untuk tahap selanjutnya mereka membahas tentang persoalan fiqih dan tasawuf. Selain kegiatan diatas para ulama juga mengajarkan kepada murid-muridnya menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu.⁵

Pendidikan Islam terus berkembang setelah para ulama mengarang buku-buku pelajaran keIslaman menggunakan bahasa melayu.

3. Lembaga Pendidikan Islam Masa Penjajahan

a. Penjajahan Belanda

Penaklukan bangsa barat atas Indonesia/Nusantara dimulai dalam bidang perdagangan, dengan kekuatan militer. Kedatangan mereka memang membawa kemajuan dibidang teknologi, tetapi tujuan sebenarnya adalah untuk meningkatkan hasil jajahan. Tidak ada hal baru yang mereka ajarkan untuk perkembangan pendidikan, akan tetapi *westernisasi* dan *kristenisasi* yang mereka kenalkan.

Awal mulanya, Belanda (tahun 1610) membiarkan saja pendidikan Islam di Nusantara. Akan tetapi, lambat laun mereka mengubah pendidikan Islam sedikit demi sedikit. Belanda mulai berusaha melumpuhkan pengaruh Islam, dimulai dari daerah yang dikuasai di Yogya dan Surakarta. Yang kemudian mendapat perlawanan dari masyarakat dan alim ulama Diponegoro. Akan tetapi mereka dapat ditaklukkan. kemudian belanda berusaha menaklukkan organisasi-organisasi Islam, zakat, wakaf, iuran untuk biaya pendidikan dihapuskan. Belanda juga orang yang tidak tahu soal agama menjadi tuan kadi, dan menjadi anggota Mahkamah Tinggi. Karena usaha-usaha inilah, pendidikan Islam lama kelamaan menjadi mundur dan maki terdesak oleh pendidikan barat.

Di jakarta, ketika Van den Bosch menjadi gubernur jenderal di jakarta tahun 1831, ia mengeluarkan kebijakan bahwa sekolah gereja diperlukan sebagai sekolah

⁵ Redja Mudyaharjo. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 201

pemerintah belanda. Departemen pendidikan menjadi satu. Di setiap daerah didirikan satu sekolah agama Kristen.

Pada tahun 1819 Van den Capellen merencanakan berdidinya sekolah dasar untuk penduduk pribumi agar dapat membantu pemerintah belanda. Akan tetapi dia menganggap bahwa pendidikan Islam tidak membantu pemerintah belanda. Belanda ingin mendirikan sekolah-sekolah dasar untuk dengan tujuan menyaingi pesantren madrasah, pengajian, dan lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya.

Pada tahun 1900 Masehi kemunduran pendidikan di Nusantara mencapai puncaknya. Tahun 1925, belanda mengeluarkan peraturan lebih ketat, bahwa tidak semua kyai boleh mengajar pengajian. Peraturan ini muncul karena tumbuhnya organisasi pendidikan pada saat itu, seperti Muhammadiyah, Syarikat Islam, Al-irsyad, Nahdhatul Wathan, dan lain-lain. Masih banyak lagi kebijakan-kebijakan pemerintah Belanda terhadap bangsa pribumi khususnya muslim pribumi.

Jika kita melihat peraturan-peraturan belanda ini, seolah-olah pendidikan Islam akan lumpuh. Akan tetapi apa yang kita saksikan sebaliknya. Pada tahun 1901 belanda melakukan politik etis, yaitu mendirikan pendidikan rakyat sampai ke desa yang memberikan hak-hak pendidikan bagi pribumi dengan tujuan mempersiapkan pegawai-pegawai yang bekerja untuk Belanda. Belanda tidak mengakui lulusan-lulusan pendidikan tradisional. Di luar dugaan dengan didirikan sekolah rakyat orang pribumi dapat mengenal sistem pendidikan modern yang kemudian mereka terapkan untuk mengadakan pembaharuan di bidang agama dan pendidikan. Maka lahirlah gerakan pembaharuan pendidikan Islam.

b. Penjajahan Jepang

Jepang menjajah Indonesia setelah mengalahkan Belanda dalam perang Dunia II pada tahun 1942 dengan semboyan Asia Timur Raya atau Asia Untuk Asia.

Pada masa awalnya pemerintah Jepang seakan-akan membela kepentingan Islam sebagai siasat untuk memenangkan perang. Untuk menarik dukungan rakyat Indonesia, pemerintah membolehkan didirikannya sekolah-sekolah agama dan pesantren-pesantren yang terbebas dari pengawasan Jepang.

Dalam bidang pendidikan, guru-guru mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Jepang untuk mendoktrinasi dalam kemakmuran bersama. Yang mana para guru

diambil dari tiap-tiap kabupaten. Bahasa Indonesia juga dijadikan sebagai bahasa pengantar semua sekolah dan menjadi mata pelajaran utama. Pihak Jepang juga mewajibkan para murid untuk mempelajari adat istiadat Jepang. mereka juga diharuskan melakukan kerja bakti seperti mengumpulkan bahan-bahan untuk perang, menanam bahan makanan, membersihkan asrama, memperbaiki jalan dan lain-lain

Demikianlah sekolah-sekolah pada masa jepang mengalami kemunduran dibandingkan dengan masa Belanda. Namun, masalah yang paling penting pada sekolah-sekolah itu adalah nasionalisasi, bahasa pengantar, serta pembentukan kader-kader muda untuk tugas berat dimasa mendatang.

c. Pendidikan Zaman Kemerdekaan

Setelah merdeka, pendidikan Islam mulai mendapat kedudukan yang sangat penting dalam sistem pendidikan nasional. Selain itu pendidikan agama disekolah juga mendapat tempat yang teratur, seksama dan penuh perhatian. Pendidikan Islam setahap demi setahap dimajukan. Upaya ini merupakan usaha untuk menata diri ditengah-tengah realitas sosial modern dan kompleks.

Sekolah agama termasuk madrasah, ditetapkan sebagai model dan sumber pendidikan nasional yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. pendidikan Islam terus ditingkatkan. Tuntutan untuk mendirikan Perguruan Tinggi juga meningkat

C. MODEL PENGELOLAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

Berdasarkan lapak tilas sejarahnya, lembaga-lembaga pendidikan Islam khususnya madrasah dan pesantren itu tumbuh dari bawah, dari gagasan tokoh-tokoh agama setempat. Diawali dari pengajian yang lantas mendirikan mushalla, masjid, madrasah diniyah, dan kemudian mendirikan pesantren atau madrasah. Sebagian besar tumbuh dan berkembang dari kecil dan kondisinya serba terbatas. Selanjutnya ada yang tumbuh dan berkembang dengan pesat atau mengalami *continuous quality improvement*, ada juga yang *stagnant*. Bagi yang terus berkembang hingga mampu mendirikan lembaga-lembaga pendidikan umum dan perguruan tinggi, didukung oleh usaha-usaha lain yang bersifat profit seperti pertanian, perdagangan, percetakan, industri jasa dan lain sebagainya.

Sejak dekade 90-an, kesadaran umat untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan Islam mulai bangkit dimana-mana dan beberapa di antaranya telah mampu menjadi sekolah

unggul atau sekolah yang efektif . Yang menjadi persoalan adalah model manajemen yang bagaimana yang tepat bagi pendidikan Islam yang memiliki mutu tinggi dan berkarakter islami

Adapun model-modelnya yaitu sebagai berikut:

1. Model Manajemen Bernuansa *Entrepreneurship*.

Sebagaimana dikemukakan di muka bahwa sebagian besar pendidikan Islam tumbuh dan berkembang dari bawah dan dari kecil. Manajemen yang tepat adalah manajemen yang dapat memberikan nilai tambah. Manajemen yang dapat memberi nilai tambah adalah manajemen yang bernuansa entrepreneurship. Rhenald Kasali dalam “Paulus Winarto menegaskan bahwa seorang *entrepreneur* adalah seorang yang menyukai perubahan, melakukan berbagai temuan yang membedakan dirinya dengan orang lain”, menciptakan nilai tambah, memberikan manfaat bagi dirinya dan orang lain, karyanya dibangun berkelanjutan (bukan ledakan sesaat) dan dilembagakan agar kelak dapat bekerja dengan efektif di tangan orang lain. Seorang manajer yang sekaligus sebagai seorang *entrepreneur* memiliki karakter sebagai berikut: memiliki keberanian mengambil resiko, menyukai tantangan, punya daya tahan yang tinggi punya visi jauh ke depan dan selalu berusaha memberikan yang terbaik.

Menjadi seorang *entrepreneur* diperlukan integritas yang kokoh, memiliki etos kerja yang tinggi dan kesanggupan untuk menghadapi tantangan, hambatan dan bahkan ancaman. Seorang entrepreneur adalah orang yang berani mengambil keputusan “keluar dari zona nyaman dan masuk ke dalam zona ketidakpastian (penuh resiko)”. Manajer yang biasa (konvensional) sebenarnya adalah orang yang paling membutuhkan keamanan dan *status quo*, dan sebaliknya takut pada perubahan. Hal ini wajar karena ia sedang berada di puncak piramida dalam struktur organisasi dengan segala fasilitas, kedudukan dan kehormatan yang melekat padanya.⁶

Seorang *entrepreneur* pada dasarnya adalah seorang pembaharu (*innovator*) karena melakukan sesuatu yang baru, dianggap baru atau berbeda dari kondisi sebelumnya. Apa yang dilakukan itu membawa perubahan ke arah yang lebih baik dan memberi nilai tambah bagi diri maupun orang lain. Dalam upaya untuk menciptakan nilai tambah seorang *entrepreneur* sangat mengutamakan kekuatan *brand*, yaitu citra atau merek yang

⁶ Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*. Ciputat. Penerbit Ciputat press, 2005, hal.

kuat atas apa yang dilakukannya. Dengan *brand* yang baik jelas akan memberikan *value* yang tinggi. *Brand image* bagi sebuah lembaga pendidikan merupakan aset yang paling berharga yang mampu menciptakan *value* bagi *stakeholder* dengan meningkatkan kepuasan dan menghargai kualitas dan akhirnya melahirkan kepercayaan. Seorang manajer yang sekaligus *entrepreneur* bukan sekedar bisa membangun *brand* belaka, namun juga memanfaatkan kekuatan *brand* untuk melipat gandakan akselerasi sebuah perubahan.

Berikut kalimat singkat, menarik yang diucapkan oleh KH Ahmad Dahlan, "*Hidup-hidupi Muhammadiyah dan jangan mencari hidup di Muhammadiyah*". Dapat ditafsirkan dalam konteks semangat *entrepreneurship*. Artinya setiap orang yang bekerja di lembaga amal usaha Muhammadiyah harus mampu memberikan nilai tambah bagi perkembangan lembaganya. Dengan cara inilah akan terjadi penumpukan kapital sehingga amal usaha Muhammadiyah dapat terus tumbuh dan berkembang.

Institusi yang memiliki nuansa *entrepreneur*, juga akan memikirkan bagaimana cara melakukan manajemen ketahanan pangan. Artinya keuangan yang ada pada bendahara itu bisa terus berlangsung dan berkembang.

Manajemen ketahanan pangan, telah diberikan contohnya oleh Nabi Yusuf as. yaitu sebagai berikut:

a. Mensyukuri dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam.

Penyelenggara institusi pendidikan Islam, hanya mempunyai dua pilihan dalam menjalani proses tersebut. Pilihan itu ialah syukur ataukah kufur. Syukur akan makmur, dan kufur akan kecebur (artinya berada pada posisi terendah dan hina). Juga mampu memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah disediakan oleh alam.

b. Etos bercocok tanam dan memproduksi pangan.

Poin ini meniscayakan adanya manajemen perencanaan pembenihan, pengolahan lahan, penanaman dan perawatan. Maksudnya lembaga pendidikan diharapkan bisa melaksanakan *rekrutment* dengan baik, proses pembelajaran yang pengajarnya tidak hanya cerdas, tetapi transformatif dan memberikan pelayanan (*service*) yang maksimal kepada warga dalam institusi tersebut.

c. Prinsip swasembada pangan dalam jangka panjang, minimal tujuh tahun.

Prinsip swasembada ialah prinsip usaha mencukupi diri sendiri. Artinya institusi jangan hanya mengharapkan bantuan pemerintah. Tetapi ada usaha lain yang dilakukan dengan kerja keras. Sehingga apabila pemerintah mungkin menghentikan bantuannya, tidak ada kekhawatiran yang tinggi. Apabila mau mencontoh nabi Yusuf as. tentunya hal itu dilakukan minimal selama tujuh tahun.

d. Berorientasi futuristik.

Yaitu etos menyimpan atau menabung dan mengelola stok pangan yang memadai untuk jangka panjang. Setelah berhasil melakukan ketiga proses diatas, apabila bendahara mempunyai *budget* yang cukup, tidak kemudian *budget* itu digunakan dengan seenaknya, tetapi diharapkan bisa diinvestasikan⁷

2. Model Manajemen Berbasis Masyarakat

Yaitu manajemen yang dapat menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar. “Data EMIS Departemen Agama menunjukkan 90% madrasah berstatus swasta dan 100 % pesantren adalah swasta”. Ini berarti bahwa lembaga pendidikan Islam adalah lembaga milik masyarakat, atau bisa dikatakan “dari, oleh dan untuk masyarakat”. Manajemen pendidikan Islam yang tepat adalah manajemen yang dapat mendekatkan pendidikan Islam dengan masyarakat, diterima, dimiliki dan dibanggakan oleh masyarakat, dan dapat mendayagunakan potensi-potensi yang dimiliki masyarakatnya. Konsep Manajemen berbasis sekolah (*Management Based School*) dan pendidikan berbasis masyarakat (*Society Based Education*) dalam konteks otonomi daerah, lahir karena dilandasi oleh kesadaran bahwa masyarakat punya peran dan tanggung jawab terhadap lembaga pendidikan di daerahnya disamping sekolah dan pemerintah.

Bagi lembaga pendidikan Islam yang memang “dari, oleh dan untuk masyarakat”, maka mengembalikan pendidikan Islam kepada masyarakat merupakan sebuah keniscayaan apabila pendidikan Islam ingin mengambil dan mendayagunakan kekuatannya. Dengan kata lain, masyarakat adalah kekuatan utama pendidikan Islam. Mencabut pendidikan Islam dari *grass root* nya (masyarakat) justru akan memperlemah pendidikan Islam itu sendiri. Pondok pesantren yang mampu menjaga hubungannya

⁷ Muhibb Abdul Wahab, *Manajemen Pangan Ala Nabi Yusuf. as*,
<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/hikmah/0dtp-manajemen-pangan-ala-nabi-yusuf-as>,

dengan basis sosialnya terbukti dapat terus berkembang, dan sebaliknya akan mengalami surut ketika ditinggalkan oleh masyarakatnya.

Lembaga-lembaga pendidikan di negara-negara maju terutama yang berstatus privat pada umumnya terdapat lembaga semacam Dewan Sekolah, Majlis Madrasah, Dewan Penyantun, Majlis Wali Amanah dan lain sebagainya yang antara lain bertugas memperhatikan hubungan, kedekatan dan aspirasi masyarakat serta siap mendayagunakan potensi masyarakat dan memberikan layanan pengabdian (langsung maupun tidak langsung) kepada masyarakat. Di Stanford University misalnya ada *The Board of Trustees* yang berwenang mengelola dana hibah dan hadiah (*grand*), sumbangan (*endowment*) dan lain sebagainya yang dihimpun dari dana masyarakat untuk pengembangan Stanford University.⁸ Di beberapa universitas luar, seperti di University of London United Kingdom dan McGill University Canada misalnya terdapat lembaga yang namanya *Board of Governor*. Anggota lembaga ini sebagian besar dari luar universitas yang pada umumnya memiliki tugas dan peran sebagaimana *The Board of Trustees* pada Stanford University. McGill University misalnya, lembaga ini dapat berkembang karena semangat amal dari masyarakatnya. Diawali dari hibah James McGill yang menghibahkan sebagian kekayaannya berupa uang 10.000 pound sterling dan tanah 40 hektar beserta real estat yang ada di dalamnya, lembaga ini didirikan dan berkembang dengan terus menggali dana dari masyarakat sampai sekarang. Di McGill, semangat beramal itu tidak hanya dalam pengertian materi terutama dari para dermawan dan hartawan, tetapi juga perbuatan dengan kontribusi tenaga maupun pikiran. Dosen, karyawan dan pimpinan McGill rela bekerja keras karena dilandasi oleh semangat amal, semangat beribadah.

Semangat beramal untuk membangun lembaga pendidikan dalam tradisi iman umat Islam sebenarnya bukan sesuatu yang baru, bahkan umat Islam pernah menjadi pelopor dalam komitmennya mengembangkan lembaga pendidikan melalui semangat amal. Yang menjadi persoalan sekarang adalah, bagaimana upaya rekonstruksi semangat beramal ini dalam mengembangkan pendidikan Islam?.

Pertama, adanya lembaga semacam Majlis Wali Amanah yang anggotanya dari wakil masyarakat yang memiliki integritas dan komitmen yang tinggi

⁸ Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*. Ciputat. Penerbit Ciputat press, 2005, hal. 57

terhadap pendidikan Islam. *Kedua*, perlu dibangkitkan kembali semangat juang , etos kerja semua komponen *stake holder* internal sebagai wujud amal (perbuatan) nyata. *Ketiga*, perlu diterapkan manajemen mutu terpadu (*total quality management*) dalam penyelenggaraan pendidikan Islam.⁹

3. Model Manajemen Berbasis Masjid (Management Based Mosque)

Embrio pendidikan Islam adalah Masjid. Manajemen pendidikan Islam yang berbasis masjid adalah manajemen yang dijiwai oleh nilai dan semangat spiritual, semangat berjamaah, semangat iklas *lillahi ta'ala* (ihlas karena Allah) dan semangat memberi yang hanya berharap pada ridlo Allah. Proses pembelajaran yang integratif dengan masjid memberikan nuansa religius yang kental dalam penanaman nilai-nilai religius maupun praktek langsung pengalaman beragama. Dimulai dari pembiasaan shalat sunah, shalat dzuhur berjamaah dan shalat ashar berjamaah bagi yang *full day school*.

Sampai saat ini pun, sebagian besar institusi pendidikan Islam itu mempunyai masjid atau mushalah yang menjadi pusat kegiatan spiritual pelajar maupun pengajar. Kata kuncinya menjadi bagaimana mengaplikasikan konsep manajemen masjid kepada institusi pendidikan Islam.

Mengapa belajar dari manajemen masjid, berikut tulisan spektakuler Dr. H. Muhibb Abdul Wahab, MA yang dimuat pada harian Republika Online (ROL) bahwa alasannya karena “*Masjid adalah pusat dan sumber inspirasi dalam segala hal, karena di masjid semua Muslim hanya mengabdikan dan memohon pertolongan kepada Allah SWT (QS Al-Fatihah [1]: 5). Ayat ini oleh para mufassir, antara lain, dimaknai ayat pembebasan manusia dari ketergantungan kepada makhluk menuju tauhid sejati. Shalat berjamaah di masjid tidak hanya melambangkan persatuan dan kebersamaan, tetapi juga persamaan (equality), egalitarianisme, dan anti-diskriminasi. Yang kaya dan miskin, pejabat dan rakyat, penguasa dan pengusaha dapat berdiri dalam shaf yang sama. Tidak ada masjid hanya dikhususkan para penguasa, pengusaha, atau pejabat. Masjid, seperti halnya kemerdekaan, adalah hak semua. Masjid mendidik kita untuk mandiri, mengembangkan semangat kebersamaan, nasionalisme, dan patriotisme sejati*”.¹⁰

⁹ *Ibid.* hlm 59

¹⁰ Muhibb Abdul Wahab, *Spirit Istiqlal* Jakarta: <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/hikmah/mrwy.spirit-istiqlal>, diakses pada 18 september 2015

Lembaga pendidikan Islam hendaknya tidak tebang pilih dalam membuat kebijakan. Apabila pelajar terlambat masuk gerbang, pelajar langsung mendapatkan hukuman, sekalipun murid mempunyai alasan yang kuat atas keterlambatannya. Tetapi apabila guru yang terlambat, tidak mendapatkan hukuman. Itulah yang kebanyakan terjadi, karena tidak belajar dari antidis kriminasi manajemen masjid.

D. MODEL DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA FORMAL ISLAM

Pendidikan formal, baik umum maupun Islam, merupakan entitas yang unik. Pendidikan formal memiliki sejarah berdiri dan perkembangan yang berbeda-beda, yang mengakibatkan pola manajemen mereka berbeda satu sama lain. Secara umum pola manajemen tersebut dapat dipilahkan menjadi empat model berikut, di mana masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.

1. Tanpa Patron

Atas inisiatif sekelompok orang yang sekaligus berperan sebagai guru dan pengelola pendidikan formal. Lembaga atau yayasan yang membawahi biasanya dibentuk kemudian sekedar sebagai persyaratan administratif, terutama terkait dengan aturan hukum. Lembaga atau yayasan tersebut tidak memiliki peran selain administratif dan formalistik, sebab pada dasarnya keberadaannya hanya sebagai formalitas.

Kelebihan pendidikan formal tipe ini terletak pada “kebebasan” pengelola Pendidikan formal. Mereka tidak tertuntut oleh target-target tertentu dari lembaga yang membawahi, sebab lembaga tersebut tidak lebih tahu urusan pendidikan formal. Hanya saja, kebanyakan pendidikan formal tipe ini tidak berkembang, bahkan kebanyakan menempatkan diri sebagai pendidikan formal “buangan” bagi siswa yang tak diterima di pendidikan formal negeri. Ini dikarenakan pengelola pendidikan formal menjadi pemikir dan sekaligus pelaksana pengelolaan pendidikan formal. Pendidikan formal tipe ini umumnya rawan konflik, terutama dalam hal rekrutmen tenaga dan saat pergantian kepala pendidikan formal.

2. Patron Simbolik

Pendidikan formal model ini pada dasarnya mirip dengan pendidikan formal tanpa patron, hanya saja, antara pendidikan formal dan lembaga atau yayasan memiliki hubungan yang relatif dekat dengan pengelola pendidikan formal. Pengelolaan pendidikan formal

sepenuhnya di tangan sekelompok pengelola pendidikan formal meski keberadaan pendidikan formal berdiri dan berkembang atas inisiatif seseorang atau komunitas sosial di sekitarnya.

Kelebihan dan kekurangan pendidikan formal tipe ini hampir sama dengan pendidikan formal tanpa patron. Sebagian pendidikan formal dapat berkembang pesat dari segi jumlah siswa, karena dukungan masyarakat yang kuat. Pendidikan formal tertentu biasanya menjadi kebanggaan karena jumlah siswanya, meski honorarium gurunya biasanya tak begitu besar. Hanya saja, pendidikan formal tipe ini umumnya rawan konflik, terutama dalam hal rekrutmen tenaga dan saat pergantian pimpinan pendidikan formal.

3. Semi Patron

Pendidikan formal tipe ini pada dasarnya juga berjalan sepenuhnya di tangan pengelola pendidikan formal, tetapi pendiri pendidikan formal memiliki pengaruh besar terhadap sikap, perilaku guru dan pengelola pendidikan formal, maupun kebijakan penting di pendidikan formal. Inisiator dan pendiri pendidikan formal berperan menentukan berbagai kebijakan strategis mulai dari menentukan visi dan misi, kebijakan pendidikan, hingga kriteria-kriteria guru dan pengelola pendidikan formal. Ini terjadi dikarenakan sang inisiator merupakan pihak yang memiliki posisi hukum kuat dan berperan dalam menyediakan berbagai sarana dan pembiayaan. Berdirinya pendidikan formal terjadi akibat inisiatif seseorang atau komunitas, yang hanya dapat berperan dalam menentukan kebijakan-kebijakan besar, tetapi kurang mampu mengelola urusan teknis di pendidikan formal.

Pendidikan formal tipe ini biasanya memiliki program dan kebijakan yang lebih terarah karena dukungan tokoh atau organisasi yang kuat. Manajemen pendidikan formal memiliki keleluasaan dalam mengelola pendidikan formal, kecuali bila menyimpang dari kebijakan pemilik pendidikan formal. Sebagian pendidikan formal dapat berkembang menjadi pendidikan formal favorit, tetapi sebagian lagi sulit berkembang karena tokoh atau lembaga yang membawahi kurang mampu memberikan arahan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

4. Patron Penuh

Pendidikan formal tipe ini pada umumnya dikelola dengan kriteria yang ketat, mulai dari visi, misi, program kurikulum hingga pembiayaan yang secara detail dirancang

dan kendalikan oleh lembaga pendiri dan pemilik pendidikan formal. Pendidikan formal tipe ini biasanya berdiri atas inisiatif seseorang atau komunitas di mana sang inisiator berperan dalam pengelolaan pendidikan formal secara menyeluruh. Selain menentukan visi, misi dan sistem kerja secara luas, lembaga atau yayasan yang membawahi pendidikan formal merancang dan mengendalikan pengelolaan pendidikan formal hingga aspek yang paling detail.

Pengelola pendidikan formal Islam sepenuhnya berperan layaknya manajer perusahaan atau kepala pendidikan formal negeri yang segala kebijakan, sikap dan keputusannya harus dikonsultasikan dengan lembaga atau dinas yang membawahi, di samping menempatkan ajaran Islam sebagai sumber primer. Pendidikan formal-pendidikan formal swasta *bonafid* yang berkembang pada kurun sekitar menjelang tahun 2000-an dan sesudahnya pada umumnya menganut model ini.

Pendidikan formal didirikan sebagai hasil rancangan seseorang atau sekelompok orang yang memiliki keahlian di bidang pendidikan, yang mampu merancang dan mengendalikan pengelolaan pendidikan formal hingga aspek yang sangat detail. Pengelola pendidikan formal pada dasarnya hanya instrumen pengelolaan yang bertugas mewujudkan visi, misi dan kebijakan pemilik pendidikan formal. Pendidikan formal tipe ini umumnya menempatkan diri sebagai pendidikan formal favorit dengan biaya mahal. Kuatnya manajemen menjadikan pendidikan formal mampu memberikan jaminan mutu yang terpercaya di masyarakat. Hanya saja, ketatnya manajemen membuat pendidikan formal ini membutuhkan guru dan pengelola pendidikan formal dengan kriteria dan pola kerja yang ketat. Meski mampu memberikan honorarium lebih baik dibanding pendidikan formal kebanyakan, tetapi tak semua orang yang memilih profesi guru memiliki kesiapan mental dan kemampuan untuk mengelola pendidikan formal seperti ini.

Pengembangan kelembagaan pendidikan formal menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan dalam bentuk penguatan kapasitas organisasi pendidikan formal yang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan mutu pendidikan formal yang ada. Berdasarkan beberapa penjelasan teori di atas minimal ada empat dimensi yang dapat dilakukan sebagai upaya pengembangan kelembagaan pendidikan formal.

a. Pertama, melakukan pengkajian terhadap kondisi lingkungan eksternal pendidikan formal (*the external environment*). Faktor pendorong dan sekaligus pembatas seberapa

jauh sesuatu pendidikan formal dapat beroperasi. Lingkungan dimaksud berupa kondisi politik dan pemerintahan (*administrative and external policies environment*), sosiokultural (*sociocultural environment*), teknologi (*technological environment*), kondisi perekonomian (*economic environment*), berbagai kelompok kepentingan (*stakeholders*), infrastruktur, serta kebijakan terhadap pengelolaan sumberdaya yang ada (*policy natural resources environment*). Seluruh komponen lingkungan tersebut perlu dianalisis bentuk pengaruhnya terhadap pendidikan formal.

- b. Kedua, meningkatkan motivasi pendidikan formal (*institutional motivation*). Lembaga pendidikan formal merupakan unit kajian yang memiliki jiwanya sendiri. Dalam konteks ini terdapat empat aspek yang bisa dipelajari dalam mengetahui motivasi pendidikan formal, yaitu sejarah pendidikan formal (*institutional history*), misi yang diembannya, kultur yang menjadi pegangan dalam bersikap dan berperilaku anggotanya, serta pola penghargaan yang dianut (*incentive schemes*).
- c. Ketiga, penguatan kapasitas pendidikan formal (*institutional capacity*). Dalam tahap ini bagaimana kemampuan pendidikan formal untuk mencapai tujuan-tujuannya. Kemampuan tersebut diukur dari lima aspek: strategi kepemimpinan yang dipakai (*strategic leadership*), perencanaan program (*program planning*), manajemen dan pelaksanaannya (*management and execution*), alokasi sumberdaya yang dimiliki (*resource allocation*), dan hubungan dengan pihak luar yaitu terhadap *clients, partners, government policy makers*, dan *external donors*.
- d. Keempat, peningkatan kinerja pendidikan formal (*institutional performance*). Adapun peningkatan kinerja pendidikan formal ini dilihat dari tiga hal pokok yang harus diperhatikan yaitu keefektifan pendidikan formal dalam mencapai tujuan-tujuannya, efisiensi penggunaan sumber daya, dan keberlanjutan pendidikan formal dalam mengemban visi dan misi yang dijalani.

Kemudian untuk menjadikan lembaga pendidikan formal sebagai lembaga yang memiliki kompetensi sebagai pusat inkubator pendidikan, maka lembaga harus ditunjang dengan kemampuan kelembagaan yang mencakup: (a) pembiayaan, harus ada ketetapan/kebijakan menyangkut proporsi (persentase) besarnya anggaran yang dapat dikelola; (b) personalia, harus ada penetapan kualifikasi SDM tertentu tertentu sebagai prasyarat menjadi pengelolaan lingkungan tersebut; (c) peralatan (sarana/ prasarana), harus

ada saran dan prasarana penunjang yang dapat mensupport operasionalisasi pendidikan formal. Di samping itu juga kemampuan kinerja kelembagaan pendidikan tinggi perlu diukur dengan melakukan evaluasi dan monitoring terus menerus dengan menitik beratkan pada; masukan (*input*), proses (*process*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*), Manfaat, (*benefit*)¹¹.

E. Kesimpulan

Pola manajemen lembaga pendidikan Islam ialah model yang dapat dipelajari dan diterapkan agar lembaga pendidikan bisa berkembang dan tentunya dapat diperhitungkan oleh lembaga pendidikan non Islam. Pola manajemen tersebut tidak terlepas dari peran seorang manajer tertinggi. Yang dalam hal ini ialah kepala institusi (kepala sekolah). Serta adanya soliditas antara semua penanggung jawab pendidikan (orangtua, guru, masyarakat/lingkungan dan pemerintah).

Lembaga Pendidikan adalah merupakan suatu wadah lembaga yang menghantarkan seseorang kedalam alur berfikir yang teratur dan sistematis. Dalam pengertiannya Pendidikan adalah “usaha sadar dan direncanakan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara”. Dalam pelaksanaannya sebuah lembaga pendidikan kerap-kali dihadapkan pada problem-problem sistem pembelajaran, mulai dari penyiapan sarana dan prasarana, materi, tujuan bahkan sampai pada penyiapan proses.

Dalam perkembangannya lembaga pendidikan sebagai sebuah lembaga yang bergerak dibidang non-profit oriented, memaksa pelaksana pendidikan menggunakan teori-teori yang sebelumnya sudah berkembang dalam dunia ekonomi. Maka tak heran ketika kita mendengar adanya teori manajemen pendidikan, yang pada dasarnya itu diambil dari teori-teori manajemen dalam dunia bisnis. Bukan berarti setelah meminjam teori manajemen ekonomi sebuah lembaga pendidikan menjadi komersial, tetapi semata-mata hanyalah digunakan sebagai landasan yang sistematis untuk mengelola sebuah lembaga pendidikan. Sehingga hasilnya pun tidak bisa seperti yang diharapkan kalau seseorang menerapkan teori manajemen dalam bidang bisnis.

¹¹ Maryadi syarif. Teori dan Model Pengembangan Pendidikan formal Islam
Media Akademika, Vol. 28, No. 3, Juli 2013

Dari kondisi yang semacam itulah, maka kita sebagai seorang yang nantinya akan mengemban amanah untuk mengembangkan potensi anak didik (manusia) dalam dunia pendidikan sesuai yang diharapkan dari makna pendidikan itu sendiri, setidaknya memahami bagaimana proses sebenarnya tentang perkembangan teori manajemen yang dikembangkan dalam dunia pendidikan.

Daftar Pustaka

- Sulistiyorini. *Manajemen Pendidikan Islam*. Surabaya : elKAF,2006
- Musyriyah Sunanto. *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*. Jakarta: PT Grafindo Persada,Cetakan keempat.2012
- Redja Mudyaharjo. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta:PT raja Grafindo Persada,2001.
- Muhbib Abdul Wahab, *Manajemen Pangan Ala Nabi Yusuf. as*,<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/hikmah/0dtpt-manajemen-pangan-ala-nabi-yusuf-as>
- Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*. Ciputat,Penerbit Ciputat press, 2005
- Muhbib Abdul Wahab, *Manajemen Pangan Ala Nabi Yusuf. as*,
<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/hikmah/dtpt-manajemen-pangan-ala-nabi-yusuf-as>.
- Maryadi syarif. Teori dan Model Pengembangan Pendidikan Tinggi Islam *Meida Akademika*, Vol. 28, No. 3, Juli 2013